

Jerman dan Indonesia di Indo-Pasifik: Apa yang Diharapkan dalam hal Keamanan Maritim dan Pertumbuhan Ekonomi?

Pandangan dalam tulisan ini tidak mencerminkan pendapat dari Friedrich-Ebert-Stiftung.

Imprint

©2020 Friedrich-Ebert-Stiftung
Kantor Perwakilan Indonesia
Jalan Kemang Selatan II No. 2 A |
Jakarta 12730
INDONESIA

Penanggung jawab:

Sergio Grassi | Resident Director

Phone : +62-21-7193711

Fax : +62-21-71791358

Email : info@fes.or.id

Website: www.fes-indonesia.org

Materi publikasi yang diterbitkan oleh **Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)** tidak dapat dipergunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan tertulis dari **FES**.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) adalah Yayasan politik tertua di Jerman.

Nama Yayasan ini diambil dari nama presiden Jerman pertama yang terpilih secara demokratis, Friedrich Ebert. Yayasan Friedrich Ebert memiliki jaringan internasional di lebih dari 100 negara dan memiliki misi untuk mendorong penerapan nilai-nilai demokrasi sosial, yaitu kebebasan, solidaritas, dan keadilan sosial.

FES mendirikan Kantor Perwakilan Indonesia pada tahun 1968 dan sejak 2012 telah bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di bidang politik, ekonomi dan masyarakat, sebagai salah satu prinsip pokok **FES** di seluruh dunia.

FES di seluruh dunia. **FES** Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung Reformasi Jaminan Sosial, Negara Kesejahteraan, dan Pembangunan Sosial Ekonomi di Indonesia serta mempromosikan Indonesia sebagai rujukan ke negara lain di kawasan dan di tingkat internasional untuk tema demokratisasi, sosial ekonomi dan pembangunan yang damai.

www.fes-indonesia.org

Jerman dan Indonesia di Indo-Pasifik: Apa yang Diharapkan dalam hal Keamanan Maritim dan Pertumbuhan Ekonomi?

Daftar Isi

Jerman dan Indonesia di Indo-Pasifik: Apa yang Diharapkan dalam hal Keamanan Maritim dan Pertumbuhan Ekonomi?	1
Mengapa pertukaran Jerman-Indonesia di Indo-Pasifik penting	3
Dimensi Keamanan Maritim	7
Dimensi Pembangunan Ekonomi	8
Bagaimana ke depannya?	10
Daftar singkatan	13
Profil Penulis	15
Tambahan	
Graphic Recorder dari Web-seminar: Geopolitics & Geo-economics in the Indo-Pacific, 8 Desember 2020	17

Jerman dan Indonesia di Indo-Pasifik: Apa yang Diharapkan dalam hal Keamanan Maritim dan Pertumbuhan Ekonomi?

Jerman dan Indonesia di Indo-Pasifik:

Apa yang Diharapkan dalam hal Keamanan Maritim dan Pertumbuhan Ekonomi?

Dinna Prapto Raharja, Ph.D¹

Negara-negara Eropa telah mengumumkan pedoman kebijakan nasional resmi mereka tentang Indo-Pasifik. Yang satu mengikuti yang lain. Pada September 2020, Pemerintah Federal Jerman mengumumkan “Pedoman kebijakan untuk Indo-Pasifik”, yang menyerukan bahwa lebih dari kawasan mana pun bentuk tatanan internasional di abad ke 21 akan diputuskan di Indo-Pasifik. Pedoman tersebut diumumkan tidak lama setelah Prancis mengeluarkannya,

dengan menyebut kawasan Indo-Pasifik sebagai “Prioritas bagi Prancis”. Pemerintah Belanda menyusul, dengan mengeluarkan dokumen kebijakan baru oleh Kementerian Luar Negeri pada 13 November 2020 yang meminta Uni Eropa untuk berbicara lebih keras tentang ketegangan di Laut Cina Selatan dan mengupayakan kerja sama dengan negara-negara di kawasan untuk menjamin jalur bebas dan keamanan maritim. Jerman, Prancis, dan Belanda memberi kesaksian dalam mendekati Uni Eropa (UE) untuk mengembangkan strategi kebijakan Eropa ke Indo-Pasifik. Inggris, yang baru-baru ini keluar dari UE, dilaporkan sedang mengembangkan strateginya sendiri di Indo-Pasifik,

¹ Lektor Kepala Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara; Pendiri, Synergy Policies. Penasihat Kebijakan Senior, *Foundation for International Human Rights Reporting Standards*. Artikel ini mencerminkan pendapat penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan Universitas, institut atau yayasan.

dengan mengumpulkan para pemimpinnya yang terkemuka untuk membahas dan menyusun strategi tersebut.

Tentu saja, jika melihat ke belakang, tak satu pun dari pemosisian ini terjadi dalam semalam. Wilayah di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadi hal yang sering dibicarakan, di antaranya menyusul kebangkitan Tiongkok sejak awal tahun 2000-an. Sebagian darinya adalah meningkatnya harapan dan kecemasan di beberapa negara terhadap kebangkitan Tiongkok. Antisipasinya adalah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di Tiongkok, potensi pembagian keuntungan dari kebangkitan tersebut, dan asumsi bahwa kebangkitan ekonomi tertentu juga akan menumbuhkan ambisi militer (dan dengan demikian mengancam perdamaian dan ketertiban yang ada). India menyebut Tiongkok sebagai “kekuatan revisionis” yang mengancam status-quo wilayah tersebut². Negara-negara lainnya melihat Amerika Serikat memiliki kepentingan yang signifikan dalam menahan pengaruh Tiongkok di kawasan sehingga kemudian mengembangkan Komando Indo-Pasifik AS³ dan memperluas aliansi kuasi di kawasan serta memperkuat aliansi AS dengan sekutu tradisionalnya⁴.

2 J.P. Panda (2021), “China as a Revisionist Power in Indo-Pacific and India’s Perception: A Power-Partner Contention”, *Journal of Contemporary China* 30 (127), 1-17.

3 US Pacific Command is now US Indo-Pacific Command. (2018). *Vayu Aerospace and Defence Review*, (4), 15. Diunduh dari <https://search.proquest.com/scholarly-journals/us-pacific-command-is-now-indo/docview/2157827770/se-2?accountid=17242>

4 S.C. Jung, J. Lee, J.-Y. Lee (2021), “The Indo-Pacific Strategy and US Alliance Network Expandability: Asian Middle Powers’ Positions on Sino-US Geostategic Competition

Ini adalah pertanyaan tentang apakah persepsi Indo-Pasifik telah tumbuh secara dominan menjadi proyek regional yang berfokus pada keamanan untuk mengekang gangguan Tiongkok terhadap tatanan maritim kawasan, atau apakah kontestasi gagasan dan kekuatan tentang Indo-Pasifik dapat mendorong integrasi ekonomi dan kerja sama di antara negara-bangsa. Apa yang diharapkan dari pertukaran pandangan tentang Indo-Pasifik? Pertanyaan-pertanyaan ini sama pentingnya dengan pertanyaan apakah Tiongkok dapat menahan diri untuk tidak menekan multilateralisme di wilayah tersebut.

Jangkar dari artikel ini adalah pedoman Jerman tentang Indo-Pasifik dan bagaimana para pemangku kepentingan Indonesia dan Jerman (atau Eropa) memandang pedoman tersebut. Ada beberapa sumber persepsi yang menginspirasi karya ini. Pertama, webinar pada 8 Desember 2020 bertajuk “Geopolitik dan Geoekonomi di Indo-Pasifik” dengan tiga pembicara: Dr. Peter Schoof, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste; Makmur Keliat, Ph.D, dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan Siswo Pramono, SH, LL.M, Ph.D, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri⁵. Saya memoderatori sesi tersebut, mene-

in Indo-Pacific Region”, *Journal of Contemporary China* 30 (127): 53-68.

5 Acara ini diselenggarakan secara bersama-sama antara kantor Friedrich Ebert Stiftung di Jakarta dan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta.

lusuri transkrip sesi-sesinya untuk mencatat perspektif bukan hanya dari para pembicara, tetapi juga para akademisi dan pembuat kebijakan yang hadir⁶. Kedua, publikasi ilmiah dan opini yang diterbitkan oleh pengamat Indonesia dan Jerman tentang Indo-Pasifik dan pedoman Jerman tentang Indo-Pasifik. Karena keterbatasan ruang, fokus saya di sini hanya pada dua dimensi: keamanan maritim dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai konteks tambahan, artikel ini ditulis ketika AS baru saja mengumumkan pemenang pemilu 2020. Karena Donald Trump akan digantikan oleh presiden terpilih Joe Biden, makalah ini akan melihat secara singkat apakah perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat dapat memengaruhi pertukaran perspektif yang ada di kawasan Indo-Pasifik.

Mengapa pertukaran Jerman-Indonesia di Indo-Pasifik penting

Ada beberapa alasan mengapa pertukaran perspektif tentang Indo-Pasifik antara Jerman dan Indonesia, serta segala potensi yang ada tidak boleh diabaikan.

Untuk memulai, setiap tatanan hubungan internasional dimulai dengan pertukaran perspektif. Bahkan tatanan persaingan dan rivalitas membutuhkan pertukaran perspektif. Sebagai catatan, pertukaran perspektif antara negara-negara yang memiliki hubungan jangka panjang, stabil, dan dapat dipercaya sangat berharga untuk proses diploma-

si ini. Negara-negara dengan pengalaman positif yang luas menjanjikan perjalanan eksplorasi yang menarik dalam tatanan internasional dengan keseimbangan optimal.

Kunci dalam pertukaran perspektif ini adalah inklusivitas dan konteks sosial politik dan sosial ekonomi yang dinamis. Istilah “inklusivitas semakin sering muncul di Indo-Pasifik. Baik pihak Indonesia maupun Jerman ingin menggunakan istilah ini, bersama-sama dengan “multilateralisme”, untuk mengungkapkan visi mereka tentang pentingnya partisipasi yang luas dan beragam dari negara-negara di Indo-Pasifik.

Di sisi lain, konteks struktur kekuasaan, tren, ketidaksetaraan, kerentanan, termasuk krisis multidimensi terbaru yang disebabkan oleh COVID-19, dapat memisahkan strategi negara satu sama lain. Sergio Grassi, Resident Director Friedrich Ebert Stiftung di Jakarta, menegaskan meningkatnya realitas proteksionisme ekonomi, nasionalisme dan persaingan geopolitik, serta keinginan Indonesia dan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) untuk menjaga sentralitas dan ketahanan di tengah tekanan tersebut. Dia menggarisbawahi pentingnya Panduan Kebijakan Jerman tentang Indo-Pasifik sebagai kontribusi penting bagi Uni Eropa dan Indo-Pasifik di masa depan.

Mengingat kerangka kerja yang disebutkan di atas, kita dapat mengharapkan potensi-potensi ini berkontribusi bagi kerjasama yang lebih ditingkatkan lagi antara negara-negara Asia dan Eropa.

⁶ Webinar ini dihadiri oleh 131 peserta.

Pertama, hubungan Jerman dan Indonesia akan membawa model kerja sama yang praktis namun menarik secara filosofis, yang dapat mengamankan keamanan maritim dan sekaligus meningkatkan pembagian ekonomi pembangunan di Indo-Pasifik. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama untuk mengembangkan narasi yang meyakinkan agar kawasan ini tetap terbuka bagi kekuatan dan program apa pun selama manfaatnya dibagi atas dasar negosiasi dan diplomasi.

Mengapa? Karena Indonesia dan Jerman terus berbagi kepentingan ekonomi bersama, mulai dari meningkatkan investasi bilateral dan kemitraan perdagangan hingga mengamankan perdamaian dan stabilitas di wilayah tempat bisnis mereka berada dan tumbuh. “Ukuran” kepentingan ekonomi bersama ini tidak dapat diabaikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyoroti panjang dan dalamnya hubungan bilateral kedua negara, meskipun hubungan diplomatik baru dimulai pada tahun 1952, hubungan investasi dan perdagangan dapat ditelusuri jauh ke pertengahan abad ke-19. Siemens, misalnya, hanya tujuh tahun setelah didirikan pada 1854, perusahaan itu mengaktifkan House of Siemens di Surabaya, Indonesia. Jerman juga dikenal oleh Kementerian sebagai “perusahaan residen” karena sejumlah perusahaan tertua di Asia adalah perusahaan Jerman. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 250 Perusahaan Multinasional Jerman yang berlokasi di Indonesia: mulai dari

logam dan mesin, kimia dan farmasi, transportasi, penyimpanan, komunikasi dan energi. Indonesia juga sangat menghargai model perlindungan sosial di Jerman untuk beradaptasi dengan tekanan dan kebutuhan pasar liberal. Selama bertahun-tahun program untuk meningkatkan dialog dan peningkatan kapasitas tentang perlindungan sosial telah diselenggarakan oleh pemerintah dan juga oleh inisiatif non-pemerintah. Indonesia juga memahami pentingnya Indo-Pasifik sebagai blok geopolitik baru yang dapat menarik banyak negara mengingat wilayah geografisnya yang strategis dan kekayaannya yang luar biasa dalam hal keanekaragaman hayati, terumbu karang, hutan, mineral, dan rumah bagi lebih dari 4,3 miliar penduduk, 750 juta di antaranya adalah pemuda berusia antara 15 hingga 24 tahun. Sebagai kawasan yang menampung sebagian besar kota-kota terbesar di dunia, sudah sewajarnya buah-buah pertumbuhan ekonomi dibagikan dan keamanannya dipupuk untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, Jerman menyoroti peningkatan keterlibatannya di Indo-Pasifik sebagai hal yang diinginkan. Selama ini, seperti yang disiratkan oleh Duta Besar Schoof, Jerman mungkin hanya sebuah negara berpenduduk sekitar delapan puluh juta orang, tetapi Jerman adalah salah satu pengeksportur dunia terbesar dan mesin di balik ekspor UE ke seluruh dunia. Dengan terbukanya pasar yang begitu besar di Indo-Pasifik, dan sekitar enam puluh persen kargo Jerman melewati Selat Malaka, Jerman perlu menyesuaikan dan menjaga model bisnis baru dan komu-

nikasi jalur laut terbuka agar dapat mempertahankan kapasitas ekspornya. Dutabesar Schoof menggarisbawahi, bahwa pedoman Pemerintah Jerman untuk Indo-Pasifik secara signifikan dipengaruhi oleh pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik.

Di saat hubungan ekonomi dapat dengan mudah dihentikan oleh politisi yang berpandangan sempit, hubungan Jerman-Indonesia mengalami hubungan yang relatif stabil selama beberapa dekade. Ikatan emosional yang kuat antara keduanya lah yang pasti telah memupuk ikatan yang tahan lama ini. Di bidang maritim, penjelajah Jerman Balthasar Sprenger menulis tentang Indonesia pada 1509 sementara Adolf Bastian adalah pakar etnologi yang pertama kali mengedepankan istilah “Indonesia”. Di bidang seni, Raden Saleh, seniman lukis ternama Indonesia yang merintis seni lukis modern di Tanah Air, tinggal bertahun-tahun di beberapa kota di Jerman. “Masjid Biru” dengan tulisan alfabet Jawa di atasnya, yang terletak di Maxen dekat Dresden, dibangun untuk menghormati Raden Saleh. Di sisi lain, Walter Spies, seniman lukis ternama Jerman, tinggal selama beberapa tahun di Yogyakarta dan Bali dan merintis seni modern di daerah-daerah tersebut. Di sisi pendidikan, Jerman sudah lama menjadi salah satu tujuan untuk sekolah lanjutan. Faktanya, Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie berkontribusi pada perusahaan penerbangan Jerman Messerschmitt Bolkow-Blohm sebagai salah satu insinyur terkemukanya sebelum ia pindah kembali ke Indonesia dan mengejar karir sebagai teknokrat dan politisi. Menurut mantan presiden Indonesia tersebut, gagasan

reformasi politiknya sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pengamatannya selama tinggal di Jerman.

Kedua, unik di era pasca-Perang Dingin, Indonesia dan Jerman sama-sama aktif mempromosikan multilateralisme dan solidaritas. Keduanya adalah aktor aktif dalam memajukan tidak hanya agenda mereka tetapi juga kebutuhan komunitas dunia yang lebih luas. Indonesia telah memperjuangkan kegiatan di gerakan anti-kolonialis Asia-Afrika dan di ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Di bidang demokrasi, masyarakat sipil, dan aktivis media, Indonesia memperjuangkan dialog demokrasi terbesar yang mengundang juga negara-negara non-demokrasi: *Bali Democracy Forum* (Forum Demokrasi Bali). Forum ini kemudian diperluas untuk mencakup Bab Berlin dan Bab Tunisia untuk menjangkau lebih banyak negara di dunia. Pada isu Indo-Pasifik, Indonesia tak henti-hentinya menjadi aktor yang mendorong sentralitas ASEAN di tengah persaingan narasi dari berbagai negara yang berperanserta di kawasan⁷. Siswo Pramono, ketua departemen analisis Kementerian Luar Negeri saat webinar menyebut ASEAN Outlook on Indo-Pacific, Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik, sebagai representasi dari perspektif negara-negara berkembang:

“...kami (negara-negara berkembang) sangat bergantung pada ketahanan nasional, bukan pada orang lain, dan kami membutuhkan mitra

7 Dewi Fortuna Anwar. (2020). “Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific”. *International Affairs* 96 (1), 111-129.

untuk pembangunan, dan perspektifnya cukup inklusif karena kami membutuhkan semua orang. Kami butuh Tiongkok, kami butuh Amerika Serikat, kami butuh Jerman....”.

Baik Indonesia maupun Jerman adalah anggota G-20 dan pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ini adalah dua platform komunikasi dan kerja sama yang tidak dapat beroperasi dalam perspektif yang bipolar dan berpusat pada diri sendiri. Duta Besar Schoof menyebutkan selama webinar bahwa kita harus belajar dari pelajaran yang dapat diambil dari dunia bipolar:

“...beberapa dari Anda mengetahui sejarah Jerman sebelum penyatuan, pada masa-masa awal Republik Federal Jerman Barat. Kebijakan kami, kebijakan luar negeri kami sangat sederhana. Kami memberikan uang dan menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah negara-negara yang tidak mengakui Jerman Timur. Itu dia Kami telah menemukan pada suatu titik bahwa dengan kebijakan luar negeri bipolar semacam itu, Anda hampir tidak ada di mana-mana ...”

Ketiga, tatanan global dibentuk oleh imajinasi, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh orang-orang di luar pemerintah, termasuk bisnis, kelompok masyarakat sipil, dan akademisi. Membuat pemerintah mengeluarkan dan mengumumkan posi-

si pemerintah federal tentang isu apa pun akan membantu membentuk imajinasi pada tingkat masyarakat ini. Citra tentang keberadaan negara, arah yang diinginkan oleh negara, dan kehadiran negara dalam suatu isu diumumkan dan pedoman yang dikeluarkan tersebut juga akan mempengaruhi urusan orang-ke-orang dan bisnis-ke-bisnis.

Jerman adalah salah satu negara dengan investasi besar dalam kerjasama pemerintah-pemerintah dan kehadiran non-pemerintah di kawasan Asia dan di Indonesia. Friedrich Ebert Stiftung hanyalah salah satu dari inisiatif tersebut. Aliran politik yang berbeda di Jerman mengembangkan keterlibatan masyarakat sipil di berbagai sektor dan fokus. Di ASEAN, Jerman termasuk kontributor terbesar sebagai mitra pembangunan⁸. Kerjasama ini menargetkan kerjasama praktis mulai dari pelatihan teknis dan keterampilan hingga promosi industri kecil dan menengah dan bantuan kebencanaan. Proyek-proyek tersebut telah menyentuh jutaan kehidupan di tingkat orang-ke-orang sehingga ketika Jerman mengadopsi pedoman Indo-Pasifik, dan menginspirasi UE untuk melakukan hal yang sama, maka perspektif keterlibatan orang-ke-orang dapat terpengaruh.

Singkatnya, jika kita berasumsi bahwa pertukaran perspektif saat ini tentang Indo-Pasifik sedang menuju penguatan bipolarisasi antara AS versus Tiongkok atau Tiongkok versus yang lain, maka perspektif dari Indonesia dan Jerman serta pertukaran

⁸ Lihat dokumen-dokumen ASEAN untuk menelusuri aspek ini.

di antara ke dua negara tersebut memiliki potensi untuk melumerkan kecenderungan tersebut. Jika orang bertanya-tanya apakah rezim Indo-Pasifik entah bagaimana dapat mempromosikan integrasi dan kerja sama ekonomi, kita dapat lebih percaya diri dalam mengatakan bahwa kerja sama akan sangat beragam sehingga konvergensi menuju integrasi ekonomi dapat menjadi sebuah mitos.

Makmur Keliat dalam webinar mengatakan bahwa gagasan Indo-Pasifik perlu dilihat dalam konteks kerangka kerja sama yang sudah ada serta sudah membuahkan hasil praktis bagi negara-negara peserta, mis. RCEP⁹ (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) ASEAN, CPTPP¹⁰ (Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik), KTT Asia Timur, ASEAN Plus Tiga, ASEAN Plus Enam, APEC (Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik), IORA¹¹ (Indian Oce-

9 RCEP adalah pakta perdagangan bebas terbesar ASEAN yang mencakup pasar dengan kekuatan 2,2 miliar orang dengan ukuran gabungan sebesar US \$ 26,2 triliun atau 30% dari PDB dunia. Perjanjian tersebut ditandatangani pada November 2020, terdiri dari 20 bab, 17 lampiran dan 54 jadwal komitmen yang meliputi akses pasar, aturan dan disiplin, kerjasama ekonomi dan teknis yang mengikat negara anggota ASEAN, Australia, China, Jepang, Republik Korea dan Selandia Baru .

10 CPTPP adalah perjanjian perdagangan bebas antara Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam. Perjanjian perdagangan ini telah berkembang dari Kemitraan Trans-Pasifik yang tidak pernah berlaku karena penarikan diri Amerika Serikat. CPTPP menggabungkan sebagian besar ketentuan TPP, tetapi menanggulangi 22 ketentuan yang disukai AS yang ditentang negara lain, termasuk aspek TPP yang paling kontroversial yaitu kekayaan intelektual dan penyelesaian sengketa investor-negara, dan menurunkan ambang batas untuk diberlakukan sehingga partisipasi AS tidak diperlukan. .

11 IORA adalah organisasi antar pemerintah yang keanggotaannya terdiri dari 23 negara dan 9 Mitra Wicara yang berbatasan dengan Samudera Hindia yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama kawasan dan pem-

an Ream Association), dan lainnya. Baginya, serangkaian proses untuk mempertanyakan kapasitas kelembagaan dan hasil dari setiap platform akan memengaruhi bagaimana Indo-Pasifik dibentuk. Pandangan ini dikonfirmasi oleh Evan Laksmana, yang menulis untuk *South China Morning Post* pada tahun 2018, yang mengatakan bahwa model tata kelola untuk mengelola masalah strategis di Indo-Pasifik akan memakan waktu¹².

Dimensi Keamanan Maritim

Tidak semua perspektif negara tentang Indo-Pasifik dibentuk oleh dimensi keamanan maritim. Namun, bagi Indonesia dan Jerman dimensi itu penting.

Indonesia dalam banyak kesempatan di masa lalu, jauh sebelum ada kerangka tentang Indo-Pasifik, bahwa Indonesia sangat menyadari letak strategisnya di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memperjuangkan pengakuan wilayah perairan, jalur damai dan berbasis aturan melalui Jalur Komunikasi Lautnya, dan kerja sama di kawasan ekonomi khusus dan di perairan internasional, berbicara tentang Indo-Pasifik sangat disinggung dalam hal identitasnya sebagai negara-bangsa maritim. Mengingat lebih dari 3,25 juta kilome-

bangunan berkelanjutan di Kawasan Samudra Hindia. Bidang kerja sama tersebut meliputi keselamatan dan keamanan maritim, fasilitasi perdagangan dan investasi, pengelolaan perikanan, pengelolaan risiko bencana, pertukaran pariwisata dan budaya, akademik, iptek, ekonomi biru, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

12 Evan A. Laksmana. (2018). "Indonesia's Indo-Pacific vision is a call for ASEAN to stick together instead of picking sides", *South China Morning Post*. 20 November.

ter wilayah Indonesia terdiri dari lautan dan samudra, Indonesia menghargai pentingnya menghormati batas perairan. Indonesia mungkin memiliki perjanjian perbatasan yang tidak konklusif dengan negara lain, tetapi agresi atau tanda-tanda agresi tentang perbatasan tidak pernah ada dalam kamus hubungan luar negeri.

Inilah sebabnya mengapa tawaran kehadiran damai Jerman dengan memperlihatkan komitmen terhadap hukum internasional yang menjamin dukungan terhadap keamanan maritim di Indo-Pasifik menarik bagi Indonesia. Indonesia hidup dengan identitas sebagai salah satu dari sedikit negara di persimpangan lalu lintas dunia. Negara seperti itu tidak bisa eksklusif atau keras kepala. Sebuah negara di persimpangan jalan akan menegosiasikan setiap peluang yang terus meningkat untuk mendapatkan keuntungan dan bereaksi terhadap setiap potensi ketidakamanan. Mengunci kesepakatan yang akan membatasi peluang untuk bernegosiasi dengan pihak lain adalah hal yang paling tidak diharapkan.

Jadi, ketika Jerman menolak klaim bahwa Pedoman tentang Indo-Pacific-nya bukanlah strategi Tiongkok, dan bukan strategi dengan fokus keamanan eksklusif untuk menciptakan agresi di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia menyetujui gagasan tersebut. Bagi Indonesia, hubungan bilateral dengan Jerman adalah hubungan tanpa beban sejarah¹³. Indonesia tidak keberatan Jerman

mengirimkan fregatnya ke Samudera Hindia karena latihan dan patroli angkatan laut tidak dipahami sebagai keinginan untuk menciptakan konflik. Indonesia memperhitungkan jalur-jalur laut yang tersibuk di kawasan ini dan menjadi kepentingannya untuk menjaga agar daerah-daerah tersebut aman dan bebas dari kontrol ketat atau dominasi kekuatan mana pun. Indonesia, sebagaimana diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, berkomitmen untuk menjadi "*Part of Solution*", bagian dari solusi bagi perdamaian dunia. Sebagai negara maritim, negara ini memahami kapan dan bagaimana ia perlu menjaga ketegangan tetap rendah di lautan.

Keinginan Jerman untuk berpartisipasi dalam berbagai forum politik-keamanan ASEAN juga dipahami secara positif oleh Indonesia. Filosofinya sekali lagi adalah inklusivitas, langkah-langkah pembangunan kepercayaan, dan penghargaan karena ASEAN telah memandu dialog antar negara yang ingin mendefinisikan narasi keamanan politik di kawasan.

Dimensi Pembangunan Ekonomi

Pada dimensi ekonomi, memang tidak dapat disangkal tentang kekhawatiran beberapa negara bahwa kebangkitan Tiongkok yang terus menerus, dikombinasikan dengan ukuran ekonominya, dapat mengganggu tatanan dunia yang sudah ada dengan mengikuti kepentingan Tiongkok. Namun baik Indonesia maupun Jerman berpendapat tidak

13 Dino Djalal. (2021). "Germany-FPI incident: What happened to trust?", *The Jakarta Post*, 8 Januari.

perlu mengkhawatirkan potensi tersebut. Fokus ke dua negara ini adalah memperluas peluang untuk bekerja sama dengan Tiongkok dan dengan negara lain yang tertarik untuk memperoleh keuntungan dari kawasan Indo-Pasifik.

Jerman, melalui Duta Besar Schoof, mengulangi kata “diversifikasi” dalam perspektif keterlibatan ekonomi Jerman di Indo-Pasifik. Pedoman tersebut mengumumkan kepada Jerman dan Eropa bahwa Jerman memandang Indo-Pasifik sebagai pusat gravitasi baru; mengganti kerangka Euro-Atlantik.

Bagi Jerman, Tiongkok bukan hanya penting di tingkat bilateral tetapi juga di tingkat multilateral ketika Jerman bekerja melalui UE. Ada banyak dimensi untuk memahami Tiongkok bagi Jerman seperti yang diakui oleh Duta Besar Schoof. Tiongkok adalah mitra untuk mengatasi banyak tantangan global seperti menghadapi perubahan iklim, Industri 4.0, keanekaragaman hayati, pandemi, Iran, dan banyak lagi. Tiongkok adalah pesaing ekonomi karena ia diuntungkan dari sistem berbasis aturan terbuka di UE sementara Eropa masih perlu mencari cara untuk mencapai penetrasi yang lebih baik ke pasar Tiongkok. Tetapi Jerman mengakui bahwa menjual produk ke Tiongkok menghasilkan output yang lebih baik daripada hanya menjual di dalam UE atau Jerman. Namun, Tiongkok adalah rival sistemik dalam hal tata kelola pemerintahan. Jerman menetapkan otoritarianisme di Tiongkok, pengabaianya terhadap hak asasi manusia, dan kecenderungannya untuk merongrong tatanan inter-

nasional sebagai tantangan. Namun Jerman percaya bahwa mendekati Tiongkok sebagai pesaing dapat menjadi bumerang bagi Jerman dan negara-negara lain yang beroperasi di kawasan Indo-Pasifik.

Indonesia, melalui Siswo Pramono, melihat pentingnya melihat Tiongkok sebagai bagian dari “Kebangkitan”, sehingga dengan demikian memperhatikan juga negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Hanya melihat ke Tiongkok saja akan melenyapkan pandangan untuk melihat realitas potensi dan arah negara-negara di kawasan itu. Siswo menyebutkan, nilai perdagangan antara Uni Eropa dan Asia jauh lebih besar dibandingkan perdagangan antara Uni Eropa dan Amerika Utara, masing-masing sebesar US \$ 1,9 triliun dan US \$ 1 triliun. Menanggapi keprihatinan tentang pandemi COVID-19, Siswo menyetujui iterasi penulis bahwa masa depan dunia adalah lebih banyak menghadapi pandemi, dan ia menekankan bagaimana orang Asia mengarah akan menjadi produsen vaksin baru mengingat bahwa kapasitas perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia saat ini, seperti Biofarma, Kalbefarma, Kimia Farma dan lainnya di kawasan ini telah mencapai produksi 260 juta ampul per tahun, belum lagi kapasitas produksi obat-obatan yang juga sudah mencapai Afrika. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh Oxford Economics, Siswo juga mencatat bahwa Indonesia adalah pendaki yang sangat konsisten dalam peringkat dunia dalam pertumbuhan ekonomi riil. Dibandingkan dengan Tiongkok, kenaikan peringkat pertumbuhan dunia Indonesia

relatif lebih tinggi dari Tiongkok. Peringkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum tahun 2010 adalah 30, pada tahun 2010 berada naik ke peringkat 12, kemudian pada tahun 2020 berada di peringkat 8 dan diharapkan berada pada peringkat 6 pada tahun 2030.

Opsi; opsi; opsi. Inilah pesan tersirat dalam pertukaran perspektif dalam dimensi ekonomi. Besarnya ukuran ekonomi tidak dilihat oleh Indonesia maupun Jerman sebagai ancaman, melainkan peluang. Setiap konsumen membutuhkan opsi. Dari vaksin hingga teknologi digital, transportasi, hingga energi terbarukan, semuanya membutuhkan opsi untuk berkembang. Tiongkok mungkin menawarkan inisiatif Belt-and-Road untuk konektivitas dan Bank Investasi Infrastruktur Asia, tetapi inisiatif tersebut tidak “membunuh” inisiatif rezim Pasca Bretton Woods yang sudah ada, dan tidak serta merta menekan munculnya inisiatif lain yang bersaing. Baik Indonesia maupun Jerman menyetujui pentingnya kontak dan jaringan orang-orang untuk memperluas cakrawala peluang. Kuncinya adalah bergandengan tangan dengan sebanyak mungkin negara dan tidak membatasi diri hanya dengan beberapa kerangka saja.

Para peserta diskusi melihat Tiongkok relevan dalam mencontohkan kemampuan beradaptasi dalam keadaan mendesak. Tetapi ada juga catatan dari pembahasan webinar bahwa kita tidak boleh terlalu berlebihan dengan mengklaim bahwa struktur otoriter lebih siap untuk menghadapi tekanan se-

perti pandemi karena ada contoh bagaimana struktur non-otoriter yang baik sangat baik pula dalam menanggapi tekanan yang sangat besar termasuk pandemi. Peristiwa yang mengganggu seperti pandemi adalah seruan untuk mengubah hidup dan lingkungan kita, untuk merefleksikan solusi-solusi sosial.

Bagaimana ke depannya?

Dengan merenungkan hal-hal yang dibahas di atas, kita dapat mengatakan bahwa meskipun ada hasil perspektif yang dapat diprediksi, dan ada interaksi antar perspektif, dunia juga diwarnai oleh kejutan. Pandemi COVID-19 adalah salah satunya, begitu pula hasil pemilu.

Pandemi ini telah mengajarkan kepada kita bahwa jaminan sosial dan kesiapsiagaan perawatan kesehatan dan dialog tentang epidemi bukan prioritas utama kebijakan di negara mana pun. Baik negara maju maupun berkembang sangat menderita karena ketidaksiapsiagaan. Potensi vaksin telah menumbuhkan masalah baru alih-alih mempercepat pemberantasan virus. Efektivitas vaksin diragukan, selain keadilan dalam distribusi vaksin, dan munculnya virus yang bermutasi. Pada pertengahan Januari 2021, negara-negara yang mengklaim telah merespons wabah virus COVID-19 dengan cepat, kembali menghadapi wabah dan kematian baru yang akhirnya mengembalikan penguncian kota.

Mengingat potensi masalah kesehatan di masa depan, masih terdapat ruang yang relatif kosong untuk program kesiapsiagaan

pandemi di Indo-Pasifik. Meskipun Jerman sudah mulai ambil bagian dalam program kesiapsiagaan pandemi Indonesia di masa depan, yaitu dalam kemitraan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN / Bappenas), skala dan jenis investasinya masih relatif kecil. Seperti yang dikemukakan oleh Siswo Pramono, Indonesia telah berinvestasi untuk menjadikan industri farmasi-nya berdaya saing, namun industri tersebut tetap membutuhkan modal untuk memperbesar jangkauan dan produksi. Selain itu, Indonesia ingin sekali meningkatkan sektor bioteknologi, juga ilmu sosial-politiknya untuk mempersiapkan dan menangani pandemi, tetapi apakah Jerman akan tanggap terhadap permintaan tersebut? Sektor kesehatan adalah isu besar di Indo-Pasifik dan tentunya juga di Indonesia. Indonesia juga memiliki sistem asuransi kesehatan nasional pembayar tunggal terbesar di dunia. Jelas, berinvestasi dalam keterlibatan sektor kesehatan dapat menghasilkan manfaat daripada kewajiban. Akankah Jerman berkomitmen untuk kemitraan yang saling menguntungkan di bidang ini?

Jerman telah menyebutkan minat untuk mendiversifikasi investasi dan perdagangannya, kemungkinan juga akan memindahkan bisnisnya dari Tiongkok ke wilayah lain di Indo-Pasifik. Namun apakah Jerman akan menerjemahkan komitmen tersebut untuk memperkuat industrialisasi dengan apa yang disebut sebagai “mitra penting” di kawasan, Indonesia? Jika industri yang melakukan diversifikasi di luar Tiongkok padat modal, maka Indonesia mungkin belum memiliki ka-

pasitas untuk memanfaatkan peluang tersebut. Tenaga kerja dan bisnis Indonesia lebih mampu dalam industri padat karya kecuali, tentu saja, Jerman membantu dalam menyamakan kedudukan untuk Indonesia. Akan- kah transfer teknologi atau kegiatan penelitian dan pengembangan menjadi bagian dari investasi, hibah, dan kerja sama Jerman ke Indonesia?

Kemenangan Joe Biden dalam pemilu di AS mengungkapkan aspek lain dalam hubungan Indonesia-Jerman. Keduanya mungkin menyambut kecenderungan multilateral yang lebih dari Joe Biden, tetapi apakah AS akan menawarkan kesepakatan eksklusif ke Jerman karena pentingnya negara itu di UE atau bagi UE? Jika itu terjadi, bagaimana itu akan mempengaruhi visi bersama tentang Indonesia dan Indo-Pasifik. Kalau itu terjadi, bagaimana itu akan berpengaruh pada visi bersama Indonesia di Indo-Pasifik?

Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan penting untuk dijawab mengingat bahwa berdasarkan prinsip kedua negara dapat berbagi tujuan yang sama, tetapi konteks peristiwa di sekitar hubungan itu mungkin memerlukan keinginan sosioekonomi dan sosial politik yang sangat kuat untuk berkomitmen pada tujuan bersama tersebut. Mungkin hanya diperlukan satu pihak untuk menerbitkan Panduan Kebijakan, tetapi dibutuhkan “dua” pihak untuk mengimbangi pelaksanaannya.

Daftar singkatan

APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation
AS	Amerika Serikat
ASEAN	the Association of South East Asian Nations
COVID-19	Corona Virus Disease 2019
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
IORA	Indian Ocean Ream Association
Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership.
UE	Uni Eropa

Profil Penulis



**Dinna Prpto
Raharja, Ph.D.**

Dinna Prpto Raharja, Ph.D. Associate Professor Hubungan Internasional dengan spesialisasi dalam ekonomi politik komparatif, Anggota Fakultas Binus University, Co-founder Paramadina Graduate School of Diplomacy, Co-founder dari Center for Social Protection Studies Universitas Indonesia, Co-founder Program Eksekutif Perlindungan Sosial antara Universitas Gadjah Mada dan Universitas Melbourne, Salah satu pendiri Institut Kebijakan Publik Atma Jaya, Pendiri lembaga konsultasi dan pelatihan Kebijakan Sinergi. Meraih gelar Doktor Filsafat dan Magister Seni dari Departemen Ilmu Politik, The Ohio State University (USA) dan Sarjana Ilmu Politik dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Aktif sebagai penulis dan pembicara, Dinna melatih para diplomat dan pembuat kebijakan tentang berbagai isu strategis termasuk kebijakan luar negeri, pembangunan dan perlindungan sosial. Ia menjabat sebagai Perwakilan Indonesia untuk Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (2016-2018). Ia bisa dihubungi di dinna.prapto.raharja@gmail.com, twitter: @Dinna_PR

Tambahan:

**Graphic Recorder dari
Web-seminar:
Geopolitics & Geo-economics
in the Indo-Pacific,
8 Desember 2020**

graphic record

WEBINAR GEO POLITICS & GEO ECONOMICS IN THE INDO-PACIFIC

TUESDAY, 8 DECEMBER 2020

OPENING REMARKS

INCREASING PRE-EXISTING...
POWER STRUCTURES TRENDS INEQUALITIES VULNERABILITIES

FOREIGN POLICY COMMUNITY
WE ACKNOWLEDGE THAT...
THE PROCESS TO SAVE FUTURE INTER-NATIONAL ORDER... WILL BE MORE DECIDED

WE WANT TO BE MORE PRO-ACTIVE TO BE PART OF THIS PROCESS!
GERMAN GOVERNMENT GUIDELINE FOR THE INDO-PACIFIC

TO INTENT TO CONTRIBUTE
POSSIBLE EUROPEAN UNION STRATEGY ON...
MOTIVATION COORDINATION INDONESIA & ASEAN

THE REGIONAL ACTIVITY LINE ON GEOPOLITICS IN ASIA AND BEYOND
FES 2021
"WE HOPE THAT TODAY'S EXCHANGE WILL CONTRIBUTE TO KICKSTART A BROADER DIALOGUE ON GEOPOLITICS & GEOECONOMICS IN INDONESIA, ASIA, THE PACIFIC AND ALSO CROSS CONTINENTAL..."

...ARE ON THE RISE!
ECONOMIC PROTECTIONISM & NATIONALISM
GLOBAL TRADE
INDONESIA (SOUTHEAST ASIA) EPICENTER
GLOBAL RIVALRY
ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC
JUNE 2019 PRESENTATION
ASIA-PACIFIC FORMED THE WORLD'S LARGEST BLOCK
RCEP
NOV

COUNTRIES APPEAL AGAIN TO THE UNITY OF THE REGION TO
RE-AFFIRM THE CENTRALITY OF ASEAN.
ENSURE THEIR OWN SECURITY.
CALL FOR GREATER RESILIENCE AGAINST PRESSURE FROM EXTERNAL POWERS.

SESSION

GEOPOLITICS AND GEOECONOMICS
IN THE INDO-PACIFIC



5 SIGNIFICANT POINTS
OF TODAY'S WEBINAR



1. GERMANY IS THE THIRD **BILATERAL DONOR** IN THE DEVELOPMENT COOPERATION IN INDONESIA



2. THE NEWEST LABEL ATTACHED TO OUR REGION

3. INDO-PACIFIC AS A GEOGRAPHICAL AREA EXCEPTIONALY RICH IN BIO-DIVERSITY, CORAL REEFS, FOREST, MINERALS



ALSO HOME FOR **4.3 BILLION** OF POPULATION

2 BILLION PRODUCTIVE AGE

750 MILLION YOUTH (AGE 15-24 Y.O)

200 MEGA CITIES OF THE WORLD

ECONOMICALLY : THE SOURCE OF GLOBAL GROWTH AND SUSTAINABILITY



4. COME UP WITH THEIR **VISIONS** INDO-PACIFIC REGION

5.

- HOW DOES INDONESIA RESPOND TO THE SHIFTING OF THE GEOPOLITICS AND GEOECONOMICS IN THE INDO-PACIFIC ?
- WHAT TO ANTICIPATE IN TERMS OF THE DYNAMIC OF THE POLITICAL SECURITY, ECONOMIC AND SOCIO-CULTURAL CIRCUMSTANCES AFFECTING THE REGION ?
- HOW DOES THE PANDEMIC AND DIGITALIZATION OF THINGS AFFECT RELATIONS AMONG NATIONS HERE ?

MAKMUR KELIAT

INDO-PACIFIC 'IDEA' TIMELINE:

1. WHY INDO-PACIFIC ?
2. HOW GEOPOLITICS AND GEOECONOMICS FRAMEWORK CAN HELP US TO UNDERSTAND INDO-PACIFIC ?

JUL 2007 THE FIRST PERSON WHOM RAISED THE TERM OF INDO-PACIFIC WAS JAPAN PRIME MINISTER ABE ABOUT THE NEED OF QUADRILATERAL INITIATIVE OF JAPAN, U.S, AUSTRALIA, INDIA.

JAN 2013 AUSTRALIA DEFENSE WHITE PAPER INDO-PACIFIC

MAY 2013 INDO-PACIFIC TREATY OF FRIENDSHIP AND COOPERATION

NOV 2017 U.S MENTIONED ABOUT INDO-PACIFIC UNDER TRUMP ADMINISTRATION.

INDONESIA FOREIGN MINISTER NATALEGAWA

GEOPOLITICS ANALYSIS
 CLASSICAL GEOPOLITICS TENDS TO PRESUME THAT GEOGRAPHY IS PERMANENT
 PRESUMETHAT GEOGRAPHY IS POLITICALLY & SOCIALLY CONSTRUCTED

GIVES BIRTH TO **CRITICAL GEOPOLITICS** LONG PERIOD OF PEACE

REPLACING **THE MILITARY GEOPOLITICS**

AS ALTERNATIVE FRAMEWORKS
 TO CHANGE NEGATIVE SENTIMENT AGAINST GEOPOLITICS
 RELEVANT TOOL OF ANALYSIS AMIDST INCREASING INTERNATIONAL COMPETITION DUE TO LIBERALISATION

CONTROL OVER ECONOMIC RESOURCES
 MAIN FACTORS: > TRADE > INVESTMENT > CAPITAL FLOW
 FRAMEWORK: > BILATERAL > REGIONAL > MULTILATERAL COOPERATION
 PREOCCUPIED MORE WITH CONTROL OVER ECONOMIC RESOURCES RATHER THAN CONTROL OVER TERRITORY.

WE HAVE A LOT OF REGIONAL FRAMEWORKS IN ASIA-PACIFIC AND INDO-PACIFIC

ASEAN	RCEP
ASEAN + 3	CPTPP
ASEAN + 6	IORA
EAS	IDRA-DP
APEC	QUADRILATERAL

" INDO-PACIFIC COOPERATION IS NOT THE ONLY BID IN TOWN!
 THE COMPETITION IS INCREASING BETWEEN REGIONAL FRAMEWORK "

FUTURE CHALLENGES ON INDO-PACIFIC:

- QUESTION OF REDUNDANCY**
 DIFFERENTIATE EACH OF REGIONAL FRAMEWORKS & SCOPE OF COOPERATION
- QUESTION OF MEMBERSHIP**
 THE AREA IS TOO LARGE! SOME AREAS ARE VOLATILE...
- QUESTION OF INSTITUTIONAL CAPACITY**
 THE MAIN PLAYER CAPACITY NEED TO BE STRENGTHENED
- HOW COULD WE SEE THE CRUCIAL ROLE**
 THE U.S WITH THE ? NEW DEMOCRATIC ADMINISTRATION

PETER SCHOOF

ALLOW ME TO SHARE SOME THOUGHTS ON...

THE INDO-PACIFIC POLICY GUIDELINES

ADOPTED AT THE BEGINNING OF SEPTEMBER 2020

IN GERMANY SYSTEM, FREQUENTLY...

STRATEGIES INITIATIVES IDEAS

...ARE COMING FROM INDIVIDUAL ACTORS IN THE GOVERNMENT

ADOPTED BY THE GOVERNMENT AFTER A LONG CONVERSATION PROCESS

GERMANY HAS COALITION GOVERNMENTS

CHRISTIAN DEMOCRATS SOCIAL DEMOCRATS

THUS THE CONSULTATION PROCESS OF THIS KIND PROJECT USUALLY FAILED!

WHY DID GERMAN DO THAT?

THERE ARE 3 MOTIVATIONAL CLUSTERS:

1. INDO-PACIFIC CENTER OF GRAVITY
2. THE RISE OF CHINA
3. NORMATIVE DIMENSION: LOOMING DANGER OF BIPOлярITY

TRY TO GIVE ANSWER FOR THESE CHALLENGES

DIVERSIFICATION

1. GEOGRAPHIC DIVERSIFICATION

WE HAVE TO LOOK AT WAYS TO INVEST MORE PARTICULARLY IN EMERGING ECONOMICS OF SOUTHEAST ASIA

2. TOPICAL DIVERSIFICATION SOME ISSUES ON BROADENING..

CONNECTIVITY EDUCATION DIGITAL TRANSFORMATION CRITICAL COOPERATION RENEWABLE ENERGY SECURITY POLICY

WE HAVE NO INTEREST IN CHOOSING SIDES!

2. THE RISE OF CHINA

THIS IS NOT 'CHINA' STRATEGY.

THIS IS A SELF-STANDING PLATFORM THAT'S BOTH NORMATIVE AND OPERATIONAL FRAMEWORK FOR FUTURE ACTIONS OF GERMANY AND E.U. AT A LATER STAGE IN THE REGION

IT'S IMPORTANT FOR GERMANY

ESTABLISH AS A PLAYER

EXPERT NATION SAFEGUARD OF ALL ITS BUSINESS MODEL

GEOGRAPHY SPEAKS AGAINST GERMANY

BUT THE SYSTEMIC POSITIONING OF EUROPE VIS A VIS INDO-PACIFIC IS CRITICAL!

GERMANY & CHINA RELATIONSHIP HAS THREE LEVELS:

1. SYSTEMIC PARTNER IN COPING SYSTEMIC CHALLENGES
2. COMPETITOR WHERE THE PROBLEM BEGINS - COMPLEX TRADE & INVESTMENT RELATIONSHIP
3. SYSTEMIC RIVAL IN TERMS OF GOVERNANCE

MOST IMPORTANT THINGS REGARDING THE INDO-PACIFIC POLICY GUIDELINES:

1. ASEAN WAS THE ONLY CONCEPT

THAT SOMEBODY IS TRYING TO CREATE A CONSTRUCTIVE SPACE ON THE BASIS OF A WELL-DEFINED NORMATIVE FRAMEWORK

WE FEEL THAT... INDO-PACIFIC POLICY GUIDELINE EXTREMELY CLOSE TO THE ASIAN OUTLOOK

2. INDO-PACIFIC POLICY GUIDELINES

PERSUASIVE PARTNERSHIPS

IT'S GENUINE EFFORT..

3. WE ARE LEARNING TO MANAGE DIFFERENCES IN A CONSTRUCTIVE WAYS

CREATING A SPACE FOR DIALOG

SISWO PRAMONO

THE MAIN LANDSCAPE FOR THE BIG AGENDA

INDO-PACIFIC → IS NOT REPLACEMENT OF **ASIA PACIFIC**

AND **THE RISE OF ASIA** → **SEASCAPE**

TO BALANCE → **ASIAN INSULAR** → **ASIAN CONNECTIVITY** → **LANDSCAPE** → **INDO-CHINA REGION** → **MUCH DEVELOPED**

IT'S JUST SOMETHING BIOLOGICAL.. **DOLPHIN** **TUNA**

ASEAN INDO-PACIFIC OUTLOOK

INDO-PACIFIC PERSPECTIVE FROM POOR REGION: FROM **ASEAN** AS DEVELOPING COUNTRIES

WE MUCH RELY ON: **NATIONAL RESILIENCE**, **ECONOMIC DEVELOPMENT**, **ETC**

WE NEED PARTNERS FOR DEVELOPMENT. WE NEED EVERYONE: **CHINA, U.S, GERMANY, ETC.**

TO NEUTRALIZED ALL THE COMPETING BIG POWERS FROM THE PERSPECTIVE OF DEVELOPING COUNTRIES AND WITH THE GUARDS FROM DEVELOPING COUNTRIES

WE CAN SEE FROM G-20

- ONLY 23% OF ASIA GDP PART OF G-20 (2000)
- 45% OF G-20 ECONOMY COMING FROM ASIA (2020)
- 51% WILL BE FROM ASIA (2030)

THE CONSISTENT RANK CLIMBER COUNTRY IS INDONESIA

Year	Rank
2000	#30
2010	#12
2020	#8
2030	#6

THE CALCULATION ON FAST GROWER COUNTRY:

1. INDIA
2. INDONESIA
3. CHINA

WE ARE JEALOUS

WHEN YOU THINK THE RISE OF ASIA IS ONLY CHINA

CONSIDERATE ALSO OTHER COUNTRIES THAT ARE CONSISTENT CLIMBER IN G-20 AND ALSO FAST-GROWERS

WHAT HAPPENS IF THE RISE OF ASIA MEANS ALSO THE RISE OF THE NEW NORM IN INTERNATIONAL NATIONS?

I THINK THE GERMAN APPROACH IS PRETTY MUCH CORRECT..

GERMANY IS THE 3RD BIGGEST DONOR IN INDONESIA

INDO PACIFIC POLICY GUIDELINES

THIS IS THE WAY TO APPROACH OF DEVELOPING COUNTRIES

BASED ON WORLD ECONOMIC FORUM REPORT:

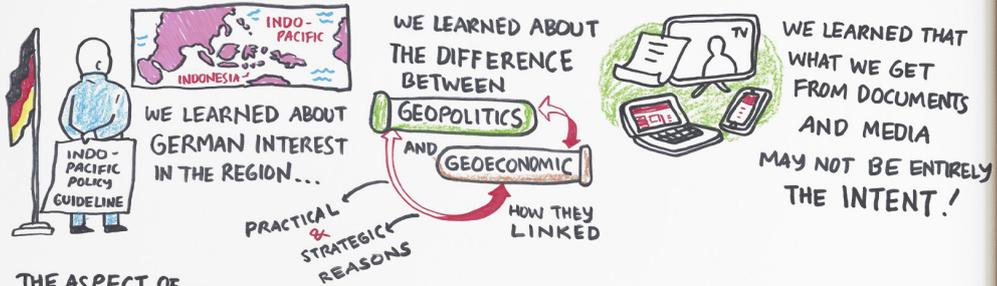
"70% - 80% OF RIVALRY FROM 2020 TO YEARS AHEAD WILL BE ECONOMICAL, NOT IDEOLOGICAL."

NORTH AMERICA

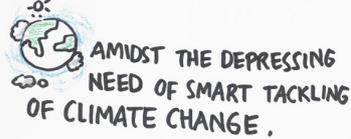
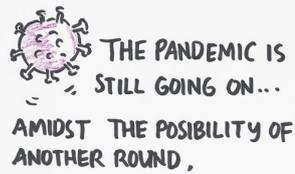
EUROPE

CLOSING REMARKS

THE EMPHASIS OF TODAY'S DISCUSSION :



THE ASPECT OF...



SOME TOUGH MEASURES IN GERMANY..

